



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 53/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2019

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 26 Desember 2019

KY Terima 1.544 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) mencatat menerima 1.544 laporan masyarakat dan 891 surat tembusan periode 2 Januari - 23 Desember 2019 (lihat infografik 1).

Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat (pos), yaitu 893 laporan. Pelapor juga datang langsung ke Kantor KY, yaitu 286 laporan. Adapun penyampaian laporan lainnya menggunakan fasilitas pelaporan online (www.pelaporan.komisiyudisial.go.id) sebanyak 281 laporan. KY juga menerima informasi (84 laporan) atas dugaan pelanggaran perilaku hakim yang kemudian ditindaklanjuti oleh KY.

Berdasarkan jenis perkara (lihat infografik 2), masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 686 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 464 laporan. Selain itu, ada juga pengaduan terkait perkara agama (90 laporan), Tata Usaha Negara (82 laporan), Tipikor (50 laporan), pemilu (36 laporan), perselisihan hubungan industrial (34 laporan), dan lingkungan (30 laporan).

Berdasarkan jenis badan peradilan yang dilaporkan (lihat infografik 2), laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 1.156 laporan. Kemudian lainnya, yaitu Mahkamah Agung sejumlah 115 laporan, Peradilan Agama sejumlah 89 laporan dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 77 laporan. Ada juga peradilan Tipikor, PHI, niaga hingga militer walau jumlahnya tidak signifikan.

Laporan ini seluruhnya diterima KY dari 34 Provinsi di Indonesia. Untuk 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke KY secara berturut-turut (lihat infografik 3) adalah: DKI Jakarta sebanyak 327 laporan, Jawa Timur sebanyak 188 laporan, Sumatera Utara sebanyak 133 laporan, Jawa Barat sebanyak 132 laporan, Jawa Tengah sebanyak 123 laporan, Sulawesi Selatan sebanyak 55 laporan, Riau sebanyak 51 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 49 laporan, Banten sebanyak 41 laporan, serta Sulawesi Utara dan NTT sebanyak 38 laporan.

Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi. Pada tahun 2019 ini, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan sebanyak 224 laporan.

Laporan lain tidak dapat diproses oleh KY karena tidak memenuhi persyaratan, yaitu laporan bukan kewenangan KY dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA, pelapor tidak menggunakan identitas yang sebenarnya, dan lainnya.

Sukma Violetta

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id

1



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2 JANUARI - 23 DESEMBER 2019

JUMLAH LAPORAN MASYARAKAT DITERIMA KOMISI YUDISIAL

891

Surat
Tembusan

2435

Laporan
Masyarakat

1544

286 Laporan

Datang langsung ke KY

893 Laporan

Jasa pengiriman

281 Laporan

Laporan online

84 Laporan

Penerimaan Informasi

1544

<https://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id>

Jumlah Penerimaan Tahun 2018

1722

[@KomisiYudisial](https://twitter.com/KomisiYudisial)[@komisiyudisialri](https://facebook.com/komisiyudisialri)[@komisiyudisialri](https://instagram.com/komisiyudisialri)humas@komisiyudisial.go.idwww.komisiyudisial.go.id



PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS PERKARA



PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT BERDASARKAN BADAN PERADILAN



Peradilan Umum
1156 laporan



Peradilan TUN
77 laporan



Niaga
17 laporan



Mahkamah Agung
115 laporan



Hubungan Industrial
28 laporan



Peradilan Militer
10 laporan



Peradilan Agama
89 laporan



Tipikor
27 laporan



Lain-lain
25 laporan



10 WILAYAH TERBANYAK PENERIMAAN LAPORAN



Provinsi lainnya:

11. NTT	: 38 Laporan	23. Lampung	: 14 Laporan
12. Sumatera Barat	: 35 Laporan	24. Bali	: 14 Laporan
13. Kalimantan Timur	: 35 Laporan	25. Sulawesi Tenggara	: 13 Laporan
14. Kalimantan Barat	: 32 Laporan	26. Bengkulu	: 9 Laporan
15. NTB	: 27 Laporan	27. Papua	: 9 Laporan
16. Jambi	: 26 Laporan	28. Gorontalo	: 8 Laporan
17. Maluku	: 23 Laporan	29. Papua Barat	: 8 Laporan
18. DI Yogyakarta	: 20 Laporan	30. Sulawesi Barat	: 7 Laporan
19. Kalimantan Selatan	: 20 Laporan	31. Sulawesi Tengah	: 6 Laporan
20. Aceh	: 18 Laporan	32. Bangka Belitung	: 5 Laporan
21. Kepulauan Riau	: 17 Laporan	33. Maluku Utara	: 5 Laporan
22. Kalimantan Tengah	: 15 Laporan	34. Kalimantan Utara	: 3 Laporan





JUMLAH LAPORAN YANG DIREGISTRASI



	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	28	17	16	17	14	13	23	21	28	14	21	11



Penanganan laporan masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Laporan yang terdiri dari dua tim:

- Tim Penanganan Laporan Pendahuluan (TPP);
- Tim Penanganan Laporan Lanjutan (TPL).

TPP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Ini dari tahap ini untuk melihat berwenang atau tidaknya Komisi Yudisial menangani laporan masyarakat. Apabila laporan bukan termasuk dalam wewenang dan tugas KY, maka TPP dapat mengusulkan untuk meneruskan laporan kepada lembaga yang berwenang.

